



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1260/KSP.00/70-75/02/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan
Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025

24 Februari 2025

Yth. Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah (*Terlampir*)

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK akan melaksanakan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 5 Maret 2025
Waktu : 08.30 – 12.00 WIB
Tempat : *Zoom Meeting* dan Youtube KPK RI
ID Rapat: 878 4335 8853
Kode Sandi: 833908

Mohon berkenan Saudara untuk hadir secara daring melalui *Zoom Meeting* dan menugaskan Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Pejabat/Pegawai terkait pengelolaan IPKD/MCP untuk mengikuti kegiatan melalui kanal Youtube KPK RI. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Septa Adhi Wibawa pada nomor telepon 0822-2790-9015 atau *e-mail: Septa.Wibawa@kpk.go.id* atau Sdr. Naufal Habibi pada nomor telepon 0878-7454-9297 atau *e-mail: Naufal.Habibi@kpk.go.id*.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi

Lampiran I

Nomor : B/1260/KSP.00/70-75/02/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

Susunan Acara

Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP 2025

No	Waktu (WIB)	Acara	Keterangan
1.	08.30 – 09.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.30 – 09.40	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Do'a	Panitia
3.	09.40 – 10.10	Sambutan dan Arahan 1. Irjen Kemendagri 2. Deputi PKD BPKP 3. Deputi Koorsup KPK	Dipandu oleh MC
4.	10.10 – 10.25	Arahan Pimpinan KPK sekaligus membuka kegiatan Launching Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP 2025	Dipandu oleh MC
5.	10.25 – 10.45	Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025	Dipandu oleh MC
6.	10.45 – 11.00	Pemaparan Pendidikan Anti Korupsi	Pemateri : Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Bp. Wawan Wardiana
7.	11.00 – 11.15	Pemaparan Materi Pencegahan Korupsi Pada Perencanaan dan Penggunaan Anggaran Daerah	Pemateri : Direktur Wilayah IV Bp. Edi Suryanto
8.	11.15 – 11.30	Penyampaian Penghargaan Bagi Pemerintah Daerah	Dipandu oleh MC
9.	11.30 – 11.45	Penutupan dan Foto Bersama	Dipandu oleh MC

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Lampiran II

Nomor : B/1260/KSP.00/70-75/02/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

Daftar Kepala Daerah/ PJ. Kepala Daerah:

PROVINSI ACEH

- 1 Pemerintah Provinsi Aceh
- 2 Pemerintah Kabupaten Simeulue
- 3 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
- 4 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
- 5 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
- 6 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
- 7 Pemerintah Kota Lhokseumawe
- 8 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
- 9 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
- 10 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
- 11 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
- 12 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
- 13 Pemerintah Kota Subulussalam
- 14 Pemerintah Kota Langsa
- 15 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
- 16 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
- 17 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
- 18 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
- 19 Pemerintah Kota Sabang
- 20 Pemerintah Kota Banda Aceh
- 21 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
- 22 Pemerintah Kabupaten Pidie
- 23 Pemerintah Kabupaten Bireuen
- 24 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

PROVINSI SUMATERA UTARA

- 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 2 Pemerintah Kabupaten Asahan
- 3 Pemerintah Kabupaten Batu Bara
- 4 Pemerintah Kabupaten Dairi
- 5 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
- 6 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
- 7 Pemerintah Kabupaten Karo
- 8 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
- 9 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 10 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 11 Pemerintah Kabupaten Langkat
- 12 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
- 13 Pemerintah Kabupaten Nias
- 14 Pemerintah Kabupaten Nias Barat
- 15 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
- 16 Pemerintah Kabupaten Nias Utara

- 17 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
- 18 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
- 19 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
- 20 Pemerintah Kabupaten Samosir
- 21 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
- 22 Pemerintah Kabupaten Simalungun
- 23 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
- 24 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- 25 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
- 26 Pemerintah Kabupaten Toba
- 27 Pemerintah Kota Binjai
- 28 Pemerintah Kota Gunungsitoli
- 29 Pemerintah Kota Medan
- 30 Pemerintah Kota Padang Sidempuan
- 31 Pemerintah Kota Pematangsiantar
- 32 Pemerintah Kota Sibolga
- 33 Pemerintah Kota Tanjungbalai
- 34 Pemerintah Kota Tebing Tinggi

PROVINSI SUMATERA BARAT

- 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 2 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Pemerintah Kota
- 4 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- 5 Pemerintah Kota Payakumbuh
- 6 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
- 7 Pemerintah Kabupaten Agam
- 8 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
- 9 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 10 Pemerintah Kabupaten Solok
- 11 Pemerintah Kota Padang
- 12 Pemerintah Kota Bukittinggi
- 13 Pemerintah Kota Pariaman
- 14 Pemerintah Kota Padang Panjang
- 15 Pemerintah Kabupaten Pasaman
- 16 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
- 17 Pemerintah Kota Solok
- 18 Pemerintah Kota Sawahlunto
- 19 Pemerintah Kabupaten Sijunjung
- 20 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- 1 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2 Pemerintah Kabupaten Bangka
- 3 Pemerintah Kabupaten Belitung
- 4 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
- 5 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
- 6 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
- 7 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- 8 Pemerintah Kota Pangkal Pinang

PROVINSI RIAU

- 1 Pemerintah Provinsi Riau
- 2 Pemerintah Kabupaten Bengkalis
- 3 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
- 4 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
- 5 Pemerintah Kabupaten Kampar
- 6 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
- 7 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
- 8 Pemerintah Kabupaten Pelalawan
- 9 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
- 10 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
- 11 Pemerintah Kabupaten Siak
- 12 Pemerintah Kota Dumai
- 13 Pemerintah Kota Pekanbaru

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- 1 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 2 Pemerintah Kota Tanjung Pinang
- 3 Pemerintah Kota Batam
- 4 Pemerintah Kabupaten Bintan
- 5 Pemerintah Kabupaten Karimun
- 6 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- 7 Pemerintah Kabupaten Natuna
- 8 Pemerintah Kabupaten Lingga

PROVINSI LAMPUNG

- 1 Pemerintah Provinsi Lampung
- 2 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- 3 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
- 4 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
- 5 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- 6 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- 7 Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- 8 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- 9 Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- 10 Pemerintah Kabupaten Pesawaran
- 11 Pemerintah Kabupaten Pringsewu
- 12 Pemerintah Kabupaten Mesuji
- 13 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 14 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
- 15 Pemerintah Kota Bandar Lampung
- 16 Pemerintah Kota Metro

PROVINSI BENGKULU

- 1 Pemerintah Provinsi Bengkulu
- 2 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
- 3 Pemerintah Kota Bengkulu
- 4 Pemerintah Kabupaten Kepahiang
- 5 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
- 6 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

- 7 Pemerintah Kabupaten Seluma
- 8 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
- 9 Pemerintah Kabupaten Kaur
- 10 Pemerintah Kabupaten Lebong
- 11 Pemerintah Kabupaten Muko Muko

PROVINSI JAMBI

- 1 Pemerintah Provinsi Jambi
- 2 Pemerintah Kabupaten Kerinci
- 3 Pemerintah Kabupaten Merangin
- 4 Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- 5 Pemerintah Kabupaten Batanghari
- 6 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
- 7 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 8 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 9 Pemerintah Kabupaten Bungo
- 10 Pemerintah Kabupaten Tebo
- 11 Pemerintah Kota Jambi
- 12 Pemerintah Kota Sungai Penuh

PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 2 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 3 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 4 Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- 5 Pemerintah Kabupaten Lahat
- 6 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
- 7 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- 8 Pemerintah Kabupaten Banyuasin
- 9 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 10 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 11 Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
- 12 Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
- 13 Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 14 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
- 15 Pemerintah Kota Palembang
- 16 Pemerintah Kota Pagar Alam
- 17 Pemerintah Kota Lubuk Linggau
- 18 Pemerintah Kota Prabumulih

PROVINSI BANTEN

- 1 Pemerintah Provinsi Banten
- 2 Pemerintah Kota Serang
- 3 Pemerintah Kota Cilegon
- 4 Pemerintah Kabupaten Tangerang
- 5 Pemerintah Kabupaten Serang
- 6 Pemerintah Kabupaten Pandeglang
- 7 Pemerintah Kabupaten Lebak

PROVINSI JAWA BARAT

- 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 2 Pemerintah Kota Bandung

- 3 Pemerintah Kota Banjar
- 4 Pemerintah Kota Cimahi
- 5 Pemerintah Kota Cirebon
- 6 Pemerintah Kota Sukabumi
- 7 Pemerintah Kota Tasikmalaya
- 8 Pemerintah Kabupaten Bandung
- 9 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- 10 Pemerintah Kabupaten Ciamis
- 11 Pemerintah Kabupaten Cianjur
- 12 Pemerintah Kabupaten Cirebon
- 13 Pemerintah Kabupaten Garut
- 14 Pemerintah Kabupaten Indramayu
- 15 Pemerintah Kabupaten Karawang
- 16 Pemerintah Kabupaten Kuningan
- 17 Pemerintah Kabupaten Majalengka
- 18 Pemerintah Kabupaten Pangandaran
- 19 Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- 20 Pemerintah Kabupaten Subang
- 21 Pemerintah Kabupaten Sukabumi
- 22 Pemerintah Kabupaten Sumedang
- 23 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

- 1 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- 3 Pemerintah Kabupaten Bantul
- 4 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
- 5 Pemerintah Kabupaten Sleman
- 6 Pemerintah Kota Yogyakarta

PROVINSI JAWA TENGAH

- 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 2 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
- 3 Pemerintah Kabupaten Banyumas
- 4 Pemerintah Kabupaten Batang
- 5 Pemerintah Kabupaten Blora
- 6 Pemerintah Kabupaten Boyolali
- 7 Pemerintah Kabupaten Brebes
- 8 Pemerintah Kabupaten Cilacap
- 9 Pemerintah Kabupaten Demak
- 10 Pemerintah Kabupaten Grobogan
- 11 Pemerintah Kabupaten Jepara
- 12 Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- 13 Pemerintah Kabupaten Kebumen
- 14 Pemerintah Kabupaten Kendal
- 15 Pemerintah Kabupaten Klaten
- 16 Pemerintah Kabupaten Kudus
- 17 Pemerintah Kabupaten Magelang
- 18 Pemerintah Kabupaten Pati
- 19 Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- 20 Pemerintah Kabupaten Pemalang

- 21 Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- 22 Pemerintah Kabupaten Purworejo
- 23 Pemerintah Kabupaten Rembang
- 24 Pemerintah Kabupaten Semarang
- 25 Pemerintah Kabupaten Sragen
- 26 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
- 27 Pemerintah Kabupaten Tegal
- 28 Pemerintah Kabupaten Temanggung
- 29 Pemerintah Kabupaten Wonogiri
- 30 Pemerintah Kabupaten Wonosobo
- 31 Pemerintah Kota Magelang
- 32 Pemerintah Kota Pekalongan
- 33 Pemerintah Kota Salatiga
- 34 Pemerintah Kota Semarang
- 35 Pemerintah Kota Surakarta
- 36 Pemerintah Kota Tegal

PROVINSI JAWA TIMUR

- 1 Pemerintan Provinsi Jawa Timur
- 2 Pemerintah Kabupaten Bangkalan
- 3 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- 4 Pemerintah Kabupaten Blitar
- 5 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- 6 Pemerintah Kabupaten Bondowoso
- 7 Pemerintah Kabupaten Gresik
- 8 Pemerintah Kabupaten Jember
- 9 Pemerintah Kabupaten Jombang
- 10 Pemerintah Kabupaten Kediri
- 11 Pemerintah Kabupaten Lamongan
- 12 Pemerintah Kabupaten Lumajang
- 13 Pemerintah Kabupaten Madiun
- 14 Pemerintah Kabupaten Magetan
- 15 Pemerintah Kabupaten Malang
- 16 Pemerintah Kabupaten Mojokerto
- 17 Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- 18 Pemerintah Kabupaten Ngawi
- 19 Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 20 Pemerintah Kabupaten Pamekasan
- 21 Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- 22 Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- 23 Pemerintah Kabupaten Probolinggo
- 24 Pemerintah Kabupaten Sampang
- 25 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- 26 Pemerintah Kabupaten Situbondo
- 27 Pemerintah Kabupaten Sumenep
- 28 Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- 29 Pemerintah Kabupaten Tuban
- 30 Pemerintah Kabupaten Tulungagung
- 31 Pemerintah Kota Batu
- 32 Pemerintah Kota Blitar
- 33 Pemerintah Kota Kediri

- 34 Pemerintah Kota Madiun
- 35 Pemerintah Kota Malang
- 36 Pemerintah Kota Mojokerto
- 37 Pemerintah Kota Pasuruan
- 38 Pemerintah Kota Probolinggo
- 39 Pemerintah Kota Surabaya

PROVINSI BALI

- 1 Pemerintah Provinsi Bali
- 2 Pemerintah Kota Denpasar
- 3 Pemerintah Kabupaten Badung
- 4 Pemerintah Kabupaten Jembrana
- 5 Pemerintah Kabupaten Buleleng
- 6 Pemerintah Kabupaten Klungkung
- 7 Pemerintah Kabupaten Karangasem
- 8 Pemerintah Kabupaten Tabanan
- 9 Pemerintah Kabupaten Gianyar
- 10 Pemerintah Kabupaten Bangli

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- 1 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2 Pemerintah Kota Kupang
- 3 Pemerintah Kabupaten Alor
- 4 Pemerintah Kabupaten Belu
- 5 Pemerintah Kabupaten Ende
- 6 Pemerintah Kabupaten Flores Timur
- 7 Pemerintah Kabupaten Kupang
- 8 Pemerintah Kabupaten Lembata
- 9 Pemerintah Kabupaten Malaka
- 10 Pemerintah Kabupaten Manggarai
- 11 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
- 12 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
- 13 Pemerintah Kabupaten Nagekeo
- 14 Pemerintah Kabupaten Ngada
- 15 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
- 16 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
- 17 Pemerintah Kabupaten Sikka
- 18 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
- 19 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
- 20 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
- 21 Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
- 22 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 23 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- 1 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
- 3 Pemerintah Kota Bima
- 4 Pemerintah Kabupaten Dompu
- 5 Pemerintah Kota Mataram
- 6 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

- 7 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
- 8 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
- 9 Pemerintah Kabupaten Bima
- 10 Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- 11 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- 2 Pemerintah Kota Singkawang
- 3 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
- 4 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- 5 Pemerintah Kabupaten Sekadau
- 6 Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- 7 Pemerintah Kabupaten Landak
- 8 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
- 9 Pemerintah Kabupaten Mempawah
- 10 Pemerintah Kabupaten Sintang
- 11 Pemerintah Kabupaten Ketapang
- 12 Pemerintah Kabupaten Sambas
- 13 Pemerintah Kabupaten Sanggau
- 14 Pemerintah Kabupaten Melawi
- 15 Pemerintah Kota Pontianak

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2 Pemerintah Kota Palangkaraya
- 3 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- 4 Pemerintah Kabupaten Barito Timur
- 5 Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- 6 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- 7 Pemerintah Kabupaten Kapuas
- 8 Pemerintah Kabupaten Katingan
- 9 Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kotawaringin Barat
- 10 Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kotawaringin Timur
- 11 Pemerintah Kabupaten Lamandau
- 12 Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- 13 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
- 14 Pemerintah Kabupaten Sukamara
- 15 Pemerintah Kabupaten Seruyan

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Pemerintah Kabupaten Berau
- 3 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- 4 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 5 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
- 6 Pemerintah Kabupaten Paser
- 7 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 8 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
- 9 Pemerintah Kota Samarinda
- 10 Pemerintah Kota Balikpapan

11 Pemerintah Kota Bontang

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- 2 Pemerintah Kota Banjarbaru
- 3 Pemerintah Kota Banjarmasin
- 4 Pemerintah Kabupaten Balangan
- 5 Pemerintah Kabupaten Banjar
- 6 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
- 7 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 8 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 9 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 10 Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kotabaru
- 11 Pemerintah Kabupaten Tabalong
- 12 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- 13 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 14 Pemerintah Kabupaten Tapin

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- 2 Pemerintah Kabupaten Bulungan
- 3 Pemerintah Kabupaten Malinau
- 4 Pemerintah Kabupaten Nunukan
- 5 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- 6 Pemerintah Kota Tarakan

PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- 2 Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- 3 Pemerintah Kabupaten Barru
- 4 Pemerintah Kabupaten Bone
- 5 Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- 6 Pemerintah Kabupaten Enrekang
- 7 Pemerintah Kabupaten Gowa
- 8 Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- 9 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- 10 Pemerintah Kabupaten Luwu
- 11 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- 12 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
- 13 Pemerintah Kabupaten Maros
- 14 Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- 15 Pemerintah Kabupaten Pinrang
- 16 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
- 17 Pemerintah Kabupaten Sinjai
- 18 Pemerintah Kabupaten Soppeng
- 19 Pemerintah Kabupaten Takalar
- 20 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
- 21 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
- 22 Pemerintah Kabupaten Wajo
- 23 Pemerintah Kota Makassar

- 24 Pemerintah Kota Palopo
- 25 Pemerintah Kota Pare Pare

PROVINSI SULAWESI BARAT

- 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
- 2 Pemerintah Kabupaten Pasang Kayu
- 3 Pemerintah Kabupaten Mamuju
- 4 Pemerintah Kabupaten Mamasa
- 5 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- 6 Pemerintah Kabupaten Majene
- 7 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

PROVINSI GORONTALO

- 1 Pemerintah Provinsi Gorontalo
- 2 Pemerintah Kabupaten Boalemo
- 3 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- 4 Pemerintah Kabupaten Gorontalo
- 5 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
- 6 Pemerintah Kabupaten Pahuwato
- 7 Pemerintah Kota Gorontalo

PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 2 Pemerintah Kota Palu
- 3 Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una
- 4 Pemerintah Kabupaten Sigi
- 5 Pemerintah Kabupaten Donggala
- 6 Pemerintah Kabupaten Banggai
- 7 Pemerintah Kabupaten Morowali
- 8 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
- 9 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
- 10 Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
- 11 Pemerintah Kabupaten Buol
- 12 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
- 13 Pemerintah Kabupaten Poso
- 14 Pemerintah Kabupaten Toli Toli

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2 Pemerintah Kabupaten Kolaka
- 3 Pemerintah Kabupaten Konawe
- 4 Pemerintah Kabupaten Muna
- 5 Pemerintah Kabupaten Buton
- 6 Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
- 7 Pemerintah Kabupaten Bombana
- 8 Pemerintah Kabupaten Wakatobi
- 9 Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
- 10 Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
- 11 Pemerintah Kabupaten Buton Utara
- 12 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
- 13 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

- 14 Pemerintah Kabupaten Muna Barat
- 15 Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
- 16 Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
- 17 Pemerintah Kota Kendari
- 18 Pemerintah Kota Bau Bau

PROVINSI SULAWESI UTARA

- 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- 2 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Pemerintah Kabupaten Minahasa
- 4 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 5 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
- 6 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
- 7 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
- 8 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
- 9 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 10 Pemerintah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
- 11 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 12 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 13 Pemerintah Kota Manado
- 14 Pemerintah Kota Bitung
- 15 Pemerintah Kota Tomohon
- 16 Pemerintah Kota Pemerintah Kotamobagu

PROVINSI MALUKU UTARA

- 1 Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- 2 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
- 3 Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
- 4 Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
- 5 Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- 6 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
- 7 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
- 8 Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
- 9 Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
- 10 Pemerintah Kota Ternate
- 11 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

PROVINSI MALUKU

- 1 Pemerintah Provinsi Maluku
- 2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
- 3 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- 4 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- 5 Pemerintah Kabupaten Buru
- 6 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
- 7 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- 8 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
- 9 Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
- 10 Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
- 11 Pemerintah Kota Ambon
- 12 Pemerintah Kota Tual

PROVINSI PAPUA

- 1 Pemerintah Provinsi Papua
- 2 Pemerintah Kota Jayapura
- 3 Pemerintah Kabupaten Jayapura
- 4 Pemerintah Kabupaten Keerom
- 5 Pemerintah Kabupaten Sarmi
- 6 Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya
- 7 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
- 8 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
- 9 Pemerintah Kabupaten Supiori
- 10 Pemerintah Kabupaten Waropen

PROVINSI PAPUA BARAT

- 1 Pemerintah Provinsi Papua Barat
- 2 Pemerintah Kabupaten Manokwari
- 3 Pemerintah Kabupaten Fak Fak
- 4 Pemerintah Kabupaten Kaimana
- 5 Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
- 6 Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
- 7 Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
- 8 Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

PROVINSI PAPUA SELATAN

- 1 Pemerintah Provinsi Papua Selatan
- 2 Pemerintah Kabupaten Merauke
- 3 Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
- 4 Pemerintah Kabupaten Mappi
- 5 Pemerintah Kabupaten Asmat

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

- 1 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
- 2 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
- 3 Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
- 4 Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
- 5 Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
- 6 Pemerintah Kabupaten Yahukimo
- 7 Pemerintah Kabupaten Tolikara
- 8 Pemerintah Kabupaten Yalimo
- 9 Pemerintah Kabupaten Nduga

PROVINSI PAPUA TENGAH

- 1 Pemerintah Provinsi Papua Tengah
- 2 Pemerintah Kabupaten Nabire
- 3 Pemerintah Kabupaten Paniai
- 4 Pemerintah Kabupaten Mimika
- 5 Pemerintah Kabupaten Puncak
- 6 Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
- 7 Pemerintah Kabupaten Deiyai
- 8 Pemerintah Kabupaten Dogiyai
- 9 Pemerintah Kabupaten Intan Jaya

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- 1 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
- 2 Pemerintah Kota Sorong
- 3 Pemerintah Kabupaten Sorong
- 4 Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
- 5 Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- 6 Pemerintah Kabupaten Tambrau
- 7 Pemerintah Kabupaten Maybrat

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko